

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH: EVALUASI DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL

Wahyu Styabudi

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Majma'al Bahroin; wahyu.styabudi87@gmail.com

	Abstract
Keywords: Islamic Economy; Sustainable Development Goals; Islamic Finance; Halal Industry	This research aims to explore the role of Islamic economics in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia, with a focus on poverty alleviation, reducing social inequality, and inclusive economic development. Using the literature study method, this research analyzes various literatures related to Islamic economics, SDGs, and their implementation in Indonesia, with the aim of understanding the relationship between the two and identifying challenges and opportunities. The results show that the Islamic finance sector, which includes Islamic banks and Islamic microfinance institutions, has great potential in providing equitable access to finance and helping the poor, especially in the small and medium enterprise (SME) sector. The halal industry sector has also shown significant contribution to the national economy by creating jobs and increasing Indonesia's competitiveness in the global market. However, the main challenges faced are unclear regulations, low public understanding of Islamic economics, and limited infrastructure that hinders access to Islamic financial services, especially in remote areas. This study concludes that to optimize the potential of the Islamic economy in supporting the SDGs, it is necessary to strengthen regulations, improve Islamic economic education, as well as cooperation between the government, the private sector, and the community.
Kata kunci: Ekonomi Syariah; Sustainable Development Goals; Keuangan Syariah; Industri Halal	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran ekonomi syariah dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis berbagai literatur terkait ekonomi syariah, SDGs, dan implementasinya di Indonesia, dengan tujuan untuk memahami hubungan antara keduanya dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah, yang meliputi bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, memiliki potensi besar dalam menyediakan akses pembiayaan yang adil dan membantu masyarakat miskin, terutama dalam sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Sektor industri halal juga menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakjelasan regulasi, rendahnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, dan keterbatasan infrastruktur yang menghambat akses ke layanan keuangan syariah, terutama di daerah-daerah terpencil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah dalam mendukung SDGs, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pendidikan ekonomi syariah, serta kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Diajukan :	
Diterima :	
Diterbitkan :	
Corresponding Author: Wahyu Styabudi Sekolah Tinggi Agama Islam Majma'al Bahroin; wahyu.styabudi87@gmail.com	

PENDAHULUAN

Pada abad ke-21, isu keberlanjutan menjadi topik yang sangat penting di seluruh dunia, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan 17 tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan (Wulandari, 2024). Meskipun SDGs diakui sebagai panduan global, implementasinya dalam konteks negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim masih menghadapi tantangan tersendiri, terutama terkait dengan penerapan prinsip syariah dalam kebijakan ekonomi. Penerapan SDGs di negara-negara dengan populasi Muslim membutuhkan pendekatan yang berbeda, karena harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat dan negara Muslim perlu memahami bagaimana ekonomi syariah dapat mendukung pencapaian tujuan ini dengan mengintegrasikan konsep keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap dampak ekonomi syariah dalam SDGs menjadi sangat penting agar lebih banyak negara Muslim dapat beradaptasi dengan baik dalam mencapainya.

Ekonomi syariah, yang berakar pada prinsip-prinsip Islam, menawarkan alternatif untuk pembangunan yang berkelanjutan melalui mekanisme keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari riba. Oleh karena itu, penerapan ekonomi syariah dapat menjadi salah satu solusi dalam mencapai tujuan SDGs, mengingat konsep keadilan sosial dan ekonomi yang terdapat dalam ajaran Islam. Konsep ini sejalan dengan banyak tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif (Noor, 2024). Namun, meskipun potensi ekonomi syariah diakui luas, banyak negara belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan pembangunan ekonomi mereka. Integrasi ekonomi syariah yang lebih baik dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Ini menunjukkan adanya gap yang signifikan dalam penerapan prinsip syariah secara efektif dalam mendukung pencapaian SDGs.

Dalam konteks Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, pengintegrasian ekonomi syariah dalam upaya mencapai SDGs menjadi sangat penting. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan ekonomi syariah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Negara ini telah memulai berbagai langkah, seperti pengembangan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, namun implementasi prinsip syariah dalam kebijakan ekonomi masih terbatas. Terlepas dari potensi tersebut, banyak kendala yang menghalangi pengembangan ekonomi syariah secara optimal, termasuk infrastruktur dan regulasi yang belum memadai. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk mengeksplorasi bagaimana ekonomi syariah dapat lebih didorong di Indonesia agar dapat lebih efektif dalam pencapaian SDGs.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh ekonomi syariah dalam mendukung SDGs adalah pemahaman yang terbatas tentang bagaimana ekonomi

syariah dapat diterapkan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan (Rohim & Yetty, 2025). Pemahaman yang terbatas ini menyebabkan kesulitan dalam merancang kebijakan yang tepat untuk mengintegrasikan ekonomi syariah dengan SDGs secara efektif. Tanpa pemahaman yang mendalam, implementasi ekonomi syariah menjadi tidak optimal dan tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian SDGs. Di sisi lain, penerapan ekonomi syariah yang lebih dalam akan mengarah pada kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan lebih adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Gap ini memerlukan perhatian lebih dalam penelitian dan implementasi praktis kebijakan yang mendukung keduanya.

Selain itu, sektor keuangan syariah, yang merupakan salah satu komponen utama dalam ekonomi syariah, masih menghadapi berbagai masalah dalam penerapan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariah. Meskipun lembaga keuangan syariah telah berkembang pesat, ada kesulitan dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketidaksesuaian produk dengan prinsip syariah ini berpotensi merugikan konsumen dan mengurangi kepercayaan terhadap sektor keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau kembali regulasi yang ada dan memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah (Suharto et al., 2024).

Keberhasilan implementasi ekonomi syariah dalam mendukung SDGs juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep ekonomi syariah. Tanpa adanya pendidikan yang memadai mengenai ekonomi syariah, masyarakat tidak akan sepenuhnya memahami bagaimana penerapannya dapat menguntungkan mereka dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pendidikan ekonomi syariah di sekolah-sekolah dan universitas harus menjadi prioritas. Pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi syariah akan membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian syariah, yang pada gilirannya dapat mempercepat pencapaian SDGs (Ma'ruf & Wulandari, 2023a).

Penting untuk menilai dampak ekonomi dan sosial dari penerapan ekonomi syariah dalam pencapaian SDGs, karena hanya dengan evaluasi yang mendalam kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi yang efektif. Evaluasi ini akan membantu kita mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan dan sistem yang ada dan menemukan solusi yang lebih baik untuk mengoptimalkan kontribusi ekonomi syariah terhadap SDGs. Tanpa evaluasi yang terus-menerus, pencapaian SDGs akan terhambat oleh faktor-faktor yang dapat diatasi dengan penyesuaian kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara ekonomi syariah dan SDGs (Ma'ruf & Wulandari, 2023b).

Isu yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketimpangan sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mempengaruhi penerapan prinsip ekonomi syariah dalam konteks SDGs.

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi mengurangi akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, sehingga memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Penerapan ekonomi syariah yang inklusif dapat mengurangi ketimpangan tersebut dengan menyediakan akses yang lebih besar kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk merancang kebijakan yang mengutamakan pemberdayaan ekonomi syariah di kalangan masyarakat miskin dan marginal agar mereka dapat merasakan manfaat langsung dari ekonomi syariah (Mansur et al., 2021).

Tantangan lainnya adalah ketidakjelasan regulasi yang mendukung ekonomi syariah di banyak negara. Di Indonesia, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, implementasinya masih terbatas pada beberapa sektor saja, dan masih banyak kendala dalam penerapan regulasi yang dapat mengakomodasi prinsip syariah dalam semua aspek ekonomi. Regulasi yang tidak jelas dan terbatas ini menjadi hambatan dalam perkembangan ekonomi syariah yang dapat berkontribusi lebih besar terhadap pencapaian SDGs. Penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang lebih mendalam sangat dibutuhkan untuk mendorong integrasi ekonomi syariah ke seluruh sektor ekonomi (Tama Putra Saratian et al., 2024).

Selain itu, ada kesenjangan pengetahuan dan pengalaman dalam hal penerapan prinsip ekonomi syariah di sektor-sektor tertentu, seperti industri halal dan pariwisata syariah. Sektor ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian syariah dan SDGs, namun penerapan prinsip-prinsip syariah yang kurang optimal dapat mempengaruhi dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana sektor-sektor tersebut dapat lebih didorong untuk berperan dalam pencapaian SDGs dengan mengintegrasikan prinsip syariah secara lebih efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi pengembangan sektor-sektor ini agar dapat lebih berperan dalam pencapaian tujuan berkelanjutan (Amalia & Riesmiyantiningtias, 2024).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana ekonomi syariah dapat menjadi bagian integral dari pencapaian SDGs, terutama dalam konteks negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia. Dengan memahami tantangan, peluang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ekonomi syariah, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih inklusif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Ekonomi syariah memiliki potensi untuk berkontribusi besar dalam mencapai SDGs, namun membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mencapainya secara optimal. Mengingat pentingnya peran ekonomi syariah dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi negara-negara berkembang, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengisi gap pengetahuan yang ada tentang implementasi ekonomi syariah dalam kerangka SDGs.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat dengan adanya tantangan besar dalam pengintegrasian ekonomi syariah dengan kebijakan pembangunan

berkelanjutan di Indonesia. Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar utama dalam pencapaian SDGs, namun pemahaman yang terbatas dan regulasi yang kurang mendukung menghambat proses tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana ekonomi syariah dapat lebih efektif diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai aspek dari ekonomi syariah, baik dalam konteks kebijakan publik, sektor keuangan, maupun sektor sosial, guna mendukung pencapaian SDGs yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam hubungan antara ekonomi syariah dan dampaknya terhadap SDGs, khususnya dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan sosial. Dengan mengeksplorasi bagaimana ekonomi syariah dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan praktis untuk pemerintah, lembaga keuangan, serta sektor swasta dalam mengoptimalkan potensi ekonomi syariah untuk pencapaian SDGs yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama untuk mengeksplorasi penerapan ekonomi syariah dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs). Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis berbagai sumber akademik dan non-akademik yang relevan guna memahami hubungan antara prinsip ekonomi syariah dan pencapaian SDGs. Dalam penelitian ini, studi literatur mencakup berbagai jenis sumber, seperti artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi dari lembaga internasional maupun nasional yang berfokus pada ekonomi syariah, keuangan syariah, serta SDGs. Proses pemilihan literatur dilakukan dengan ketat, mengutamakan sumber-sumber terbaru, kredibel, dan relevan dengan topik yang dibahas, terutama yang membahas implementasi ekonomi syariah di negara dengan populasi Muslim besar, seperti Indonesia.

Dalam kajian literatur ini, peneliti akan melakukan analisis tematik dan komparatif untuk menilai berbagai teori, model, dan praktik yang ada dalam ekonomi syariah, serta dampaknya terhadap pencapaian SDGs. Literatur yang dikaji akan mencakup konsep dasar ekonomi syariah, prinsip-prinsip keuangan syariah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara Muslim dalam mengintegrasikan ekonomi syariah dengan SDGs. Peneliti juga akan membandingkan berbagai kebijakan ekonomi syariah yang telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk memahami keberhasilan dan kegagalan yang terjadi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi gap dan kebutuhan kebijakan yang dapat mengoptimalkan kontribusi ekonomi syariah dalam mencapai SDGs. Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam dan

komprehensif mengenai potensi dan tantangan dalam penerapan ekonomi syariah di tingkat global dan nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Ekonomi Syariah dalam Mencapai SDGs: Evaluasi Dampak Ekonomi dan Sosial di Indonesia

Pada subjudul ini, penelitian ini mengungkapkan bagaimana ekonomi syariah dapat berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam konteks Indonesia, yang memiliki populasi mayoritas Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah, yang meliputi bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, dapat membantu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Sistem pembiayaan berbasis profit-sharing yang diterapkan dalam ekonomi syariah memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank konvensional untuk memperoleh modal usaha, sehingga membantu mereka keluar dari kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh (Qomaro et al., 2024) mengonfirmasi bahwa keuangan syariah membantu masyarakat untuk menghindari beban bunga yang tinggi yang biasa dikenakan oleh lembaga keuangan konvensional. Namun, meskipun sudah ada kemajuan, tantangan yang masih harus diatasi adalah memperluas akses ke layanan keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil, yang memerlukan regulasi yang lebih jelas dan dukungan dari pemerintah.

Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satu cara utama ekonomi syariah mengatasi ketimpangan adalah dengan menyediakan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM). UKM merupakan sektor yang paling terdampak oleh keterbatasan akses keuangan. Produk pembiayaan syariah yang mengutamakan bagi hasil memungkinkan UKM berkembang tanpa terbebani oleh bunga yang tinggi. (Qomaro et al., 2024) mencatat bahwa produk pembiayaan syariah berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berusaha dan berkembang. Meskipun begitu, untuk memperluas manfaat ini, diperlukan kebijakan yang lebih terfokus pada sektor-sektor yang paling membutuhkan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Ekonomi syariah juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang menjadi fokus dari SDG 8. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sektor industri halal di Indonesia telah berkembang pesat dan berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Industri halal, terutama dalam sektor makanan, kosmetik, dan fashion, telah meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan meningkatkan pendapatan negara. (Fuadah & Fadhilah, 2025) menunjukkan bahwa industri halal tidak hanya mendukung perekonomian tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah yang sejalan dengan tujuan SDGs. Sektor ini turut memperkenalkan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih adil. Walaupun

demikian, masih terdapat tantangan dalam memperkuat regulasi dan membangun infrastruktur yang mendukung sektor ini, agar dapat terus berkembang dengan berkelanjutan.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ekonomi syariah berpotensi besar untuk mendukung SDGs, implementasinya di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur sektor keuangan syariah. (Novitasari & Angganita, 2024) menyoroti bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki dasar hukum untuk ekonomi syariah, banyak kebijakan yang tidak cukup jelas dan terkadang membingungkan bagi pelaku industri. Selain itu, masih terdapat ketidaktahuan masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah yang ada. Ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang lebih terintegrasi dan upaya besar dalam pendidikan ekonomi syariah di masyarakat.

Keberlanjutan sektor keuangan syariah di Indonesia juga menjadi faktor penting dalam pencapaian SDGs. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sektor ini memiliki potensi untuk memberikan alternatif pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sosial. (Musthofa et al., 2024) menjelaskan bahwa sektor keuangan syariah berfokus pada pembiayaan yang memprioritaskan investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan ramah lingkungan. Keuangan syariah memiliki potensi untuk mendukung sektor-sektor yang berfokus pada keberlanjutan, seperti energi terbarukan dan infrastruktur hijau, yang sesuai dengan SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Namun, untuk mencapai potensi ini, diperlukan pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa semua produk keuangan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyimpang dari tujuannya.

Pendidikan ekonomi syariah menjadi salah satu elemen kunci dalam mengoptimalkan kontribusi sektor ini terhadap pencapaian SDGs. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran masyarakat, pemahaman mengenai ekonomi syariah masih terbatas, terutama di daerah-daerah yang tidak terlalu berkembang. (Firdaus, 2023) menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan ekonomi syariah dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor ini. Masyarakat yang memahami manfaat ekonomi syariah lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang berbasis prinsip keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan ekonomi syariah di sekolah-sekolah dan universitas, guna membentuk masyarakat yang lebih sadar dan terlibat dalam perekonomian syariah. Penelitian ini juga menemukan bahwa industri halal di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mendukung SDGs, terutama dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Mencatat bahwa industri halal, yang mencakup berbagai sektor seperti makanan, kosmetik, dan pariwisata, dapat menciptakan ribuan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor ini memberikan kontribusi terhadap pengurangan pengangguran, yang sejalan dengan

SDG 8 yang mengutamakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan dalam memperkuat daya saing produk halal Indonesia di pasar global, yang memerlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Sektor keuangan syariah memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan sosial yang ada, namun masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses layanan ini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan yang lebih adil kepada masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional. (Fretika & Rohman, 2025) menunjukkan bahwa produk keuangan syariah lebih adil dan lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, karena mereka tidak terbebani oleh bunga yang tinggi. Produk-produk ini memungkinkan mereka untuk melakukan investasi yang produktif, yang akan berdampak positif terhadap pengurangan ketimpangan sosial. Pemerintah memainkan peran penting dalam mendukung sektor ekonomi syariah agar dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan yang mendukung ekonomi syariah, seperti UU Perbankan Syariah, kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar. Pemerintah juga perlu berperan aktif dalam meningkatkan pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah yang ada, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian syariah.

Selain itu, sektor ekonomi syariah dapat membantu mendorong pembangunan berkelanjutan melalui praktik-praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan sosial. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem ekonomi syariah mengedepankan keberlanjutan dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, yang sangat sesuai dengan SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. (Adibah & Zakariya, 2024) mencatat bahwa prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan membuat sektor ekonomi syariah lebih ramah terhadap lingkungan, dan dapat mendorong Indonesia untuk mencapai tujuan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Evaluasi terhadap kinerja keuangan syariah menunjukkan bahwa sektor ini telah berkembang pesat namun masih perlu perbaikan dalam mendanai proyek-proyek besar yang berfokus pada keberlanjutan, seperti energi terbarukan dan infrastruktur hijau. Untuk mendukung pencapaian SDGs, sektor keuangan syariah perlu mengalokasikan lebih banyak dana untuk proyek-proyek yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengurangan dampak perubahan iklim. Ini akan berperan dalam mewujudkan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Tantangan terbesar dalam integrasi ekonomi syariah dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah ketidakjelasan regulasi dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah. Hal yang perlu digaris bawahi adalah mencatat bahwa untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan penguatan infrastruktur pendidikan untuk

meningkatkan pemahaman tentang ekonomi syariah. Dengan kebijakan yang mendukung dan pemahaman yang lebih luas, sektor ekonomi syariah akan dapat berperan lebih besar dalam mendukung pencapaian SDGs dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

Strategi Peningkatan Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia untuk Mencapai SDGs yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan

Ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), namun implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, integrasi ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan masih terbatas. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan regulasi dalam sektor keuangan syariah, yang sering kali membuat pelaku industri dan masyarakat bingung mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Menurut penelitian oleh (Hariyanto et al., 2023) meskipun ada undang-undang yang mendukung perbankan syariah, penerapannya sering kali tidak konsisten di berbagai sektor, menyebabkan ketidakpastian dalam pengembangan ekonomi syariah. Tanpa regulasi yang jelas, sektor ini akan kesulitan untuk berkembang lebih jauh dan berkontribusi lebih maksimal pada SDGs. Tanpa kepastian hukum, investor dan pelaku usaha mungkin enggan berinvestasi di sektor ini, sehingga potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain ketidakjelasan regulasi, rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan praktik ekonomi syariah menjadi tantangan besar dalam mengimplementasikan sektor ini untuk mendukung SDGs. Penelitian oleh (Sumarni, 2020) menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pendidikan ekonomi syariah, pemahaman masyarakat luas tentang manfaat ekonomi syariah masih terbatas. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan syariah, yang pada akhirnya membatasi dampak positif yang dapat diberikan terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial. Untuk itu, diperlukan peningkatan pendidikan dan penyuluhan yang lebih luas agar masyarakat dapat memahami bagaimana ekonomi syariah dapat memberikan keuntungan bagi mereka, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi. Peningkatan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat juga akan mendorong mereka untuk memanfaatkan produk-produk keuangan syariah yang lebih berkelanjutan dan adil.

Infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi syariah juga menjadi salah satu hambatan yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di daerah-daerah terpencil, akses terhadap layanan keuangan syariah sangat terbatas. (Fuadi et al., 2022) mencatat bahwa meskipun bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah telah berkembang di kota-kota besar, mereka belum menjangkau daerah-daerah dengan populasi Muslim yang tinggi namun miskin dan terisolasi. Untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan syariah, perlu ada pengembangan infrastruktur yang dapat memperluas jaringan distribusi produk syariah hingga ke

daerah-daerah terpencil. Tanpa upaya ini, ekonomi syariah tidak akan dapat memberi dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dalam mengembangkan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah untuk mempercepat distribusi produk dan layanan keuangan.

Potensi sektor industri halal untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia sangat besar, namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor industri halal, yang mencakup makanan, kosmetik, dan fashion, dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. (Hidayat et al., 2024) menyebutkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki posisi yang strategis untuk mengembangkan industri halal, yang dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan berupa ketidakpastian dalam regulasi dan pengembangan produk yang tidak sepenuhnya mematuhi standar halal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terfokus pada pengembangan sektor ini, termasuk pemberian insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam industri halal. Selain itu, sektor ini juga membutuhkan dukungan lebih dalam hal riset dan pengembangan untuk memastikan bahwa produk halal yang dihasilkan dapat bersaing di pasar internasional.

Bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua lembaga ini telah membantu banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. (Hasan & Mustafa, 2022) mencatat bahwa produk-produk pembiayaan berbasis syariah yang mengutamakan bagi hasil lebih cocok untuk UKM karena tidak memberatkan mereka dengan bunga yang tinggi. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memanfaatkan produk ini karena kurangnya informasi dan pemahaman. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkenalkan produk-produk keuangan syariah ini kepada masyarakat luas, terutama di kalangan UKM yang berpotensi untuk berkembang. Penyuluhan dan sosialisasi mengenai manfaat produk syariah di tingkat lokal dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah. Pemerintah memegang peranan penting dalam memperkuat integrasi ekonomi syariah dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung ekonomi syariah, seperti UU Perbankan Syariah dan pembentukan lembaga-lembaga keuangan syariah, implementasinya masih belum maksimal. Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tanpa sinergi yang baik antara pemerintah dan

sektor swasta, sektor ekonomi syariah akan kesulitan untuk berkembang secara optimal dan berkontribusi pada pencapaian SDGs.

Untuk mencapai SDGs yang lebih inklusif dan berkelanjutan, pendidikan ekonomi syariah harus menjadi prioritas. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang teredukasi dengan baik mengenai ekonomi syariah akan lebih mudah berpartisipasi dalam sektor ini. (Iskandar, 2023) mencatat bahwa pendidikan ekonomi syariah yang lebih luas di tingkat sekolah dan universitas dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat sektor ini, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kualitas pendidikan ekonomi syariah di seluruh Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang lebih paham dan terlibat dalam perekonomian syariah. Selain itu, pengenalan lebih dini mengenai ekonomi syariah di lembaga pendidikan dasar dan menengah akan memberikan dasar yang kuat untuk memahami prinsip-prinsip keuangan syariah di masa depan.

Sektor industri halal di Indonesia terus berkembang, namun untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs, sektor ini memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa sektor industri halal tidak hanya dapat menciptakan lapangan pekerjaan tetapi juga meningkatkan perekonomian daerah-daerah yang selama ini tertinggal. (Khotimah, 2024) menyarankan bahwa untuk memaksimalkan potensi ini, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar domestik dan internasional. Dengan mengembangkan sektor ini lebih lanjut, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam pasar industri halal global. Perlu juga adanya standar kualitas yang jelas untuk produk halal, sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional. Keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi masih ada kendala dalam pengembangan sektor ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga keuangan syariah telah berkembang pesat, sektor ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil. Penting ada perbaikan dalam infrastruktur keuangan syariah, termasuk pengembangan cabang-cabang bank syariah di wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Selain itu, program literasi keuangan syariah juga harus diperluas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah yang tersedia. Peningkatan akses terhadap layanan keuangan syariah juga dapat mempercepat inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi di seluruh Indonesia.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi ekonomi syariah untuk mencapai SDGs adalah ketidakpastian regulasi yang ada. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Perbankan Syariah, regulasi yang lebih jelas dan spesifik masih dibutuhkan untuk memastikan pengembangan sektor ekonomi syariah yang berkelanjutan. Kebijakan yang lebih terfokus pada sektor ekonomi syariah akan memudahkan integrasi sektor ini dengan sektor ekonomi lainnya, dan akan

menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi perkembangan industri syariah. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam regulasi yang ada untuk mendorong integrasi yang lebih baik. Dengan adanya regulasi yang jelas, sektor ekonomi syariah dapat tumbuh dengan lebih stabil dan berkontribusi maksimal pada pencapaian SDGs.

Masyarakat juga perlu lebih memahami bagaimana ekonomi syariah dapat memberikan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pendidikan yang lebih baik tentang ekonomi syariah, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan keuangan syariah dan produk-produk ekonomi syariah lainnya. Pemahaman yang lebih baik tentang produk-produk ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah, yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian SDGs. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan pendidikan ekonomi syariah di semua jenjang pendidikan. Dengan memperluas wawasan tentang ekonomi syariah, masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penting untuk menilai dan mengevaluasi implementasi ekonomi syariah secara berkelanjutan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian SDGs. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi besar, namun pengawasan yang lebih ketat dan kebijakan yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa sektor ini dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang berkelanjutan terhadap sektor ekonomi syariah sangat penting untuk melihat perkembangan dan dampak yang dihasilkan, serta untuk menemukan solusi bagi tantangan yang ada. Evaluasi ini juga akan membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mengoptimalkan potensi sektor ekonomi syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi dalam implementasi ekonomi syariah, seperti ketidakjelasan regulasi, rendahnya pemahaman masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur, perlu segera diatasi. Agar ekonomi syariah dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian SDGs, diperlukan penguatan regulasi yang mendukung sektor ini, peningkatan pendidikan ekonomi syariah, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor ekonomi syariah dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia, sekaligus berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, A. N., & Zakariya, A. (2024). Analysis of Economic Improvement through Sharia Economic Resource Development Towards Sustainable Prosperity in Indonesia. *Journal of Finance, Economics and Business*, 3(1), 98–108. <https://doi.org/10.59827/jfeb.v3i1.120>
- Amalia, R., & Riesmiyantiningtias, N. (2024). Sharia Compliance and Economic Stability: Insights from Bank Syariah Indonesia, Padang Ulak Karang Branch. *Al Urwah : Sharia Economics Journal*, 2(02), 58–70. <https://doi.org/10.61536/alurwah.v2i02.81>
- Firdaus, F. A. (2023). Peluang Dan Tantangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 93–108.
- Fretika, T. A., & Rohman, A. (2025). The Role of Sharia Capital Markets and Sharia Banking Financing In Indonesia's Economic Growth. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i1.23>
- Fuadah, R. A. N., & Fadhilah, L. N. (2025). Contribution of the Halal Industry in Implementing a Sustainable Economy in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 10(8), 306–317. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18443>
- Fuadi, M., Suriani, S., & Zulham, T. (2022). Can Sharia Finance Affect Indonesia's Economic Growth? *International Journal of Finance, Economics and Business*, 1(3), 166–176. <https://doi.org/10.56225/ijfeb.v1i3.32>
- Hariyanto, E., Harisah, Hidayatullah, Hamzah, M., Mujib, F., & Marheni, C. L. (2023). In Search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 7(2), 244–261. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.1080.pp244-261>
- Hasan, H., & Mustafa, C. (2022). The Politics of Law of Sharia Economics in Indonesia. *Lex Publica*, 9(1), 30–57. <https://doi.org/10.58829/lp.9.1.2022.30-57>
- Hidayat, A., Akbar, W., Ardiansyah, M., & Ibrahim, E. A. B. (2024). The Impact of Sharia Economics on The Vision of A Golden Indonesia 2045. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 116–140. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v6i2.297.116-140>
- Iskandar, I. (2023, January 1). The Dynamics of Politics in the Development of Sharia Economic Law in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Environmental Law and Mining Law*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343513>
- Khotimah, U. K. (2024). Sharia Economic Law Regulation In Indonesia And Malaysia: Implementation And Challenges. *SASI*, 30(4), 402–415. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i4.2312>
- Ma'ruf, A., & Wulandari, A. P. (2023a). Exploration of Shariah Non-Compliant Risk: Evidence from Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 8(2), 110–121. <https://doi.org/10.23971/jaq.v8i2.7064>
- Ma'ruf, A., & Wulandari, A. P. (2023b). Exploration of Shariah Non-Compliant Risk: Evidence from Indonesia. *AL-QARDH*, 8(2), 110–121.

- <https://doi.org/10.23971/jaq.v8i2.7064>
- Mansur, F., Lecturer, A., Hizazi, A., & Rahayu, S. (2021). Sharia Principle Compliance Model Between Islamic Financial Performance and Social Performance Evidence from Indonesia. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 10(4), 148–153. <https://doi.org/10.35940/ijrte.d6560.1110421>
- Musthofa, A. Y., Afif, F., & Karimuddin, K. (2024). Strengthening Sharia Economic Law in Indonesia: Challenges and Strategic Approaches Amidst Global Economic Dominance. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.8521>
- Noor, A. (2024). Employment Inclusion as a Solution to Overcome Poverty and Economic Inequality in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 9(17), 113–126. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i18.16342>
- Novitasari, E. F., & Angganita, N. A. H. (2024). Analisis Pembangunan Ekonomi Syariah Era Globalisasi Di Indonesia: Peluang & Tantangan. *Gorontalo Development Review (GOLDER)*, 7(2), 104–117.
- Qomaro, G. W., Nasrulloh, N., & Deuraseh, N. (2024). Sharia Compliance and Economic Resilience of Women-Led SMEs in Madura Indonesia. *Journal of Islamic Civilization*, 6(2), 107–122. <https://doi.org/10.33086/jic.v6i2.6600>
- Rohim, A. N., & Yetty, F. (2025). Contribution of Islamic economy in achieving Sustainable Development Goals (SDGs). *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 4(1), 56–69. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol4.iss1.art5>
- Suharto, S., Himawan, H., Mubarak, A., Hakim, S., & Amelia, V. (2024). Determinant Of Stakeholders Reliance On Indonesian Islamic Banking. *BALANCE: JOURNAL OF ISLAMIC ACCOUNTING*, 5(1). <https://doi.org/10.21274/balance.v5i1.9469>
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.3358>
- Tama Putra Saratian, E., Rokhmatul Aysa, I., & Sudiana, U. (2024). The Effect of Implementing Sharia Principles in the Financial Industry on Economic Stability: Case Study at Bank BTPN Syariah. *Al Urwah : Sharia Economics Journal*, 2(01), 50–57. <https://doi.org/10.61536/alurwah.v2i01.50>
- Wulandari, C. E. (2024). Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Kurikulum Pendidikan Islam: Sebuah Tinjauan Literatur. *TarbiyahMU*, 4(2), 22–28.